

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Inovasi

2.1.1.1 Pengertian Inovasi

Everett dan Rekha (2006:108) menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Adapun indikatornya terdiri dari :

- 1) Gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal,
- 2) Produk dan jasa yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih kongkrit dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan termasuk hasil inovasi di bidang Pendidikan
- 3) Upaya perbaikan usaha yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan yang terus-menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.

Jennifer M. George and Gareth R. Jones (2012:24-25) mengemukakan inovasi adalah kemampuan organisasi untuk meningkatkan jasa atau produk-produk lainnya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan inovasi (a). Inovasi barang/produk, (b). Inovasi dalam layanan, (c) inovasi dalam metode (cara mereka produksi).

Sejalan dengan Robbins and Timothy (2013:626) menyatakan bahwa inovasi adalah ide baru diterapkan untuk memulai atau meningkatkan produk, proses, dan layanan yang memiliki indikator a) Produk (*product*) adalah suatu

tindakan yang berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, b) Proses (*process*) adalah aktivitas atau hasil dari pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan c) layanan (*services*) adalah membuat perubahan ke lini produk dalam rangka menarik perhatian lebih dari konsumen. Adapun dimensi dan indikator-indikatornya sebagai berikut

1. Dimensi produk yang terdiri dari : penciptaan ide baru, perbaikan produk pembelajaran.
2. Dimensi inovasi proses yang terdiri dari : cara dalam membuat produk pembelajaran, dan implementasi hasil penemuan.
3. Dimensi layanan yang terdiri dari: peningkatan daya tarik produk pembelajaran, dan sosialisasi produk pembelajaran baru.

Menurut Enas, dkk (2025:55) inovasi produk dapat diterapkan dengan memanfaatkan produk umpan balik dari pelanggan, melakukan perbaikan produk yang sudah ada menambah fitur produk, mengamati kelemahan dari kompetitor, membentuk tim riset untuk pengembangan produk, dan melakukan konsultasi dengan pihak ketiga.

Dengan menerapkan konsep inovasi produk ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik saat ini terutama pada sistem pembelajaran program kesetaraan Paket C.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah tindakan untuk mewujudkan ide baru dalam memperbaharui suatu produk atau proses yang sudah ada ataupun baru dengan cara bertahap yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Indikator-indikatornya adalah: penciptaan ide-ide baru, penggunaan program baru, penambahan fasilitas layanan, dan pembuatan metode baru.

2.1.2 Manajemen Strategi Pendidikan

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Strategi

Nana Sudjana (2004:17) menyatakan bahwa manajemen adalah kepemimpinan dan keterampilan untuk melakukan kegiatan baik bersama-sama orang lain atau melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian menurut Nanang Fattah (2006:1), manajemen adalah suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, dengan mengaitkan proses dan manajer yang dihubungkan dengan aspek organisasi dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan yang lain dan bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan sistem.

Manajemen adalah kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga atau sekolah yang bersifat manusia maupun non manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam kaitan ini dijelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam manajemen yaitu adanya proses atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, adanya penataan, adanya upaya untuk menggerakkan, adanya sumber-sumber potensial yang harus dilibatkan baik sumber daya manusia maupun non manusia dan adanya tujuan yang harus dicapai secara efektif dan efisien (Sulistiyorini, 2009:11-12).

Dengan manajemen kreativitas dan inovasi berbasis perubahan mengharuskan organisasi dalam hal ini lembaga Pendidikan untuk dapat mengelola perubahan secara efektif, untuk menjadi sumber potensi dalam menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif (Enas dkk, 2025:134).

Kemudian menurut Agustinus Sri (2021:31) bahwa dalam manajemen strategi terdiri dari tiga proses:

1. Pembuatan strategi, yang meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan, pengembangan alternatif strategi dan penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi.
2. Penerapan strategi, meliputi penentuan sasaran-sasaran operasional tahunan, kebijakan perusahaan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.
3. Evaluasi / kontrol strategi, mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan Organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Mencermati pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam suatu kelompok tertentu secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan yang ditetapkan. Fungsi-fungsi sebagaimana yang dimaksud di atas meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Strategi adalah satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya, kesemuanya menjamin agar tujuan organisasinya tercapai (Eti Rochaety, dkk, 2010:27). Sedangkan Lashway (Syafaruddin dan Asrul, 2015: 146), mendefinisikan strategi ialah pola perilaku yang dirancang untuk mencapai kerjasama dan para anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian dalam menyusun strategi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari yang berasal dari dalam maupun dari luar. Strategi menurut Hax (Conni Chairunnisa, 2016:123), dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral.

- b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan alokasi sumber daya.
- c. Menyeleksi bidang yang ditekuni organisasi.
- d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang bertahan lama.
- e. Melibatkan seluruh masyarakat organisasi.

Istilah manajemen strategi terbentuk dari dua kata yakni strategic berasal dari bahasa Yunani, strategis, yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Jenderal Yunani yang efektif perlu memimpin tentara, memenangkan peperangan dan mempertahankan wilayah melindungi kota dari serangan musuh, menghancurkan musuh. Pengertian yang cukup luas manajemen strategi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan yang memiliki berbagai komponen yang saling yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak kearah yang sama pula. Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan strategi organisasi. Sedang komponen kedua adalah pelaksanaan operasional dengan unsur-unsurnya adalah sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengaggaran, kebijakan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.

Konteks manajemen istilah strategik diartikan sebagai cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Rancangan ini disebut sebagai perencanaan strategik. Manajemen strategik adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, perpasif, dan

berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan (Sondang Siagian, 2014:4).

2.1.2.2 Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Manajemen Strategik

a. Fungsi Manajemen Strategik

Manajemen strategik itu berfungsi membuat keputusan strategik, menyusun rencana strategik, serta untuk peninjauan atau evaluasi strategik. Adapun fungsi manajemen strategik itu sama halnya dengan fungsi manajemen yang menjadi acuan para manajer dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen dibagi menjadi empat yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dapat disimpulkan manajemen dan organisasi berkaitan erat karena sama sama ingin mencapai tujuan dan arah yang tepat dalam sebuah organisasi (Irham Fahmi, 2017:2).

b. Tujuan Manajemen Strategik

Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud. Usahnya ialah mencapai hasil-hasil yang spesifik, biasanya dinyatakan tidak berwujud karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya, yakni output pekerjaan, ada kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik. Tujuan utama manajemen sebagaimana pendapat Shrode dan Voich (2009:10) adalah produktivitas dan kepuasan. Produktivitas itu sendiri dipengaruhi oleh perkembangan bahan, teknologi dan kinerja manusia.

Nanang Fattah (2006:18), secara garis besar tujuan manajemen strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.
3. Senantiasa memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
4. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.
5. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

Dalam hal ini, manajemen fokus pada produktivitas dan kepuasan melalui strategi yang dieksekusi efisien, dievaluasi rutin, diperbarui sesuai perubahan luar, analisis kekuatan-kelemahan, serta inovasi produk.

c. Manfaat Manajemen Strategik

Manfaat manajemen strategik adalah membantu organisasi membuat strategi yang lebih baik lagi dengan pendekatan yang lebih rasional, logis dan sistematis. Membuat pengertian pada karyawan bahwa pentingnya komitmen dalam organisasi untuk mencapai tujuan lembaga. Selain itu juga dapat meningkatkan kesadaran daripada ancaman eksternal sehingga berkurangnya penolakan terhadap perubahan/inovasi (Rachmat, 2018:19). Manajemen strategik itu sangatlah penting, karena apabila organisasi ingin berhasil dari waktu ke waktu di tengah perubahan-perubahan yang terjadi maka mestilah menerapkan

manajemen strategik. Maka apabila terkait dengan sebuah lingkungan lembaga dan masa depan, sebuah lembaga juga mestilah berpikir yang bersifat strategis, seperti halnya visi dan misi, cara-cara untuk mencapainya, dan lainnya. Jadi, saat pengambilan keputusan strategis itu berlangsung bisa melihat bagaimana keadaan organisasinya di masa yang akan datang, ia sekaligus dapat menyelesaikan tantangan permasalahan operasional perusahaannya dari waktu ke waktu. Maka daripada itu, dengan manajemen strategik, sebuah lembaga memiliki gambaran menyeluruh atas lembaganya (Taufiq Amir, 2014:8).

Manajemen strategik bermanfaat sebagai sarana mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan jalan yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut kepada pemilik, karyawan, dan pihak lainnya. Sehingga mereka memiliki kepekaan terhadap hal tersebut. Oleh karena itu mereka akan memiliki sikap proaktif dalam menyikapi perubahan lingkungan, dengan demikian mereka akan memiliki kesiapan dalam menghadapi kemungkinan yang muncul.

2.1.2.3 Proses Manajemen Strategik

Menurut Amirullah (2020:18), tahapan manajemen strategik antara lain:

a. Formulasi Strategi

Formulasi strategi ialah yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Dalam hal ini organisasi mestilah merumuskan visi, misi, nilai, mencermati lingkungan internal dan eksternal.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi ialah proses manajemen dalam mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan

prosedur. Dalam penerapan di lapangan dengan adanya struktur yang jelas, proses, motivasi, kompensasi, dan pengawasan. Ada setidaknya lima langkah penting untuk mengimplementasikan manajemen strategis, yaitu (1) menganalisis dan merencanakan perubahan, (2) mengkomunikasikan perubahan (3) mendorong perubahan (4) mengembangkan inisiasi transisi, (5) konsolidasi kondisi baru dan tindak lanjut (Mulyasa, 2014:166).

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi ialah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari formulasi dan implementasi strategik termasuk mengukur kinerja organisasi, serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Setelah strategi diimplementasikan, sangatlah penting apabila mempertimbangkan apakah tujuan sudah dapat dicapai. Apabila sudah bermanfaat maka tujuan yang lainnya dapat kita buat (Wibowo, 2014:37).

2.1.2.4 Pendekatan Manajemen Strategi

Lahirnya berbagai pendekatan dalam manajemen strategis tidak lepas kaitannya dengan setting waktu, latar belakang sejarah dan kondisi global yang turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan dunia usaha, bisnis dan perdagangan. Berdasarkan pendekatannya, setidaknya dapat diidentifikasi adanya tujuh pendekatan yang berkembang dalam manajemen strategis. Ketujuh pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan militeristik.

Pendekatan militeristik meletakkan sudut pandang kemiliteran dalam menerapkan manajemen strategis. Asumsi yang digunakan dalam berbagai pengambilan keputusan strategis didasarkan pada asumsi militeristik.

2. Pendekatan integratif.

Kemampuan manajerial strategis yang dinilai baik dalam pengelolaan lembaga berdasarkan pendekatan ini antara lain adalah kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, mensintesis dan memecahkan permasalahan.

3. Pendekatan perencanaan korporat

Struktur organisasi yang memiliki banyak divisi merupakan perwujudan pendekatan ini dalam penerapan manajemen strategis.

4. Pendekatan kompetitif

Pendekatan yang bercirikan dengan kreativitas dan inovasi manajerial dari sebuah lembaga dalam rangka menguatkan keunggulannya di tengah persaingan..

5. Pendekatan porter.

Penekanan pendekatan pandangan porter adalah pada karakteristik dan kedudukan sebuah lembaga.

6. Pendekatan logical incrementalism.

Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam manajemen strategis untuk menyusun atau melakukan formulasi strategi dengan mendasarkan pada pengalaman-pengalaman baru yang dihasilkan dari banyak percobaan. Pendekatan visioner.

Pendekatan ini bersifat ambisius dan memiliki determinasi yang tinggi terhadap sebuah keberhasilan. (Triton, 2011:41)

Kemudian secara umum Paul Bate yang dikutip Aries Munandar¹ (2013:73) menawarkan 4 (empat) pendekatan manajemen strategik dalam upaya melakukan perubahan budaya organisasi, yaitu :

- 1) Pendekatan agresif (*Aggressive approach*); perubahan budaya organisasi dengan menggunakan pendekatan kekuasaan, nonkolaboratif, sifatnya dipaksakan.
- 2) Pendekatan jalan damai (*Conciliative approach*); perubahan budaya organisasi dilakukan secara kolaboratif, dipecahkan bersama dan integratif.
- 3) Pendekatan korosif (*Corrosive approach*); perubahan budaya yang dilakukan dengan pendekatan informal, tidak terencana, evolutif dan mengandalkan networking. Budaya lama sedikit demi sedikit diganti dengan budaya yang baru.
- 4) Pendekatan indoktrinasi (*Indoctrinative approach*); pendekatan yang bersifat normatif dengan menggunakan program pelatihan dan pendidikan ulang terhadap budaya baru.

Beberapa pendekatan dalam manajemen strategis sebagaimana dikemukakan di atas dapat digunakan pihak berkompeten baik secara parsial maupun secara simultan. Oleh karena kontrol di tingkat institusi sangat kuat, maka para pemimpin yang dalam konteks ini adalah kepala PKBM sangat dimungkinkan untuk mengadopsi sebuah pendekatan strategis dalam manajemen. Manajemen strategis membutuhkan kemampuan untuk mengintegrasikan aspek-aspek sekolah yang berbeda untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang terbaik (Tony Brush, 2008:31).

2.1.3 Sistem Pendidikan

2.1.3.1 Pengertian Sistem Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat

penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogike”. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata “pais” yang berarti “anak” dan kata “ago” yang berarti “aku membimbing”. Jadi paedagogike berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut “paedagogos” (Soedomo A. Hadi, 2008: 17). Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak.

Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld (Revrisond Baswir dkk, 2003:108) bahwa: 1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. 2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab. 3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani.

Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali anak untuk menapaki kehidupannya di masa yang akan

datang. Jadi dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan.

Tilaar (2002:435) menyatakan bahwa “hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”. Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup.

Hal ini juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Saroni (2011: 10) bahwa, “pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk *survive* yang

dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan.”

Beberapa konsep pendidikan yang telah dipaparkan tersebut meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu: pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

2.1.3.2 Tujuan Pendidikan

Dalam tujuan pembangunan, pendidikan merupakan sesuatu yang mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Menurut Herbison dan Myers (Panpan Achmad Fadjri, 2000: 36) “pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat”. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya

dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya (Nazili Shaleh Ahmad, 2011: 3).

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kyridis, et al. (2011: 3) mengungkapkan bahwa *“for many years the belief that education can increase social equality and promote social justice, has been predominant”*. Hal senada dikemukakan oleh Herera (Muhadjir Darwin, 2010: 271) bahwa *“melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan, maka pekerjaan yang layak lebih mudah didapatkan”*. Dari apa yang dikemukakan oleh Kyridis dkk dan

Herera tersebut dapat memberi gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Todaro & Smith (2003: 404) menyatakan bahwa “pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.” Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bruns, dkk (2003: 1) bahwa:

Education is fundamental for the construction of globally competitive economies and democratic societies. Education is key to creating, applying, and spreading new ideas and technologies which in turn are critical for sustained growth; it augments cognitive and other skills, which in turn increase labor productivity.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Barbara dkk tersebut tampak bahwa, pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan ide-ide baru dan teknologi yang sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan, bahkan dengan pendidikan pula akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dari berbagai tujuan pendidikan yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang handal dan memiliki kemampuan mengembangkan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti, dengan pendidikan anak akan memiliki bekal kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat dunia. Dengan pendidikan pula,

memungkinkan seseorang memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dan sejahtera.

2.1.4 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

2.1.4.1 Pengertian PKBM

PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat sesuai dengan potensi ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan alamnya (Siti Ariyanti, 2017:3).

PKBM sebagai salah satu mitra kerja pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat (bangsa) melalui program-program pendidikan nonformal, diharapkan mampu menumbuhkan masyarakat belajar (*learning society*) sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian, keberdayadidikan, dan inovatif dalam mencari berbagai informasi baru dalam rangka meningkatkan kehidupannya. Jenis PKBM menurut Sihombing dan Gutama (2000) adalah suatu wadah keseluruhan tentang kegiatan pembelajaran di masyarakat dalam rangka meningkatkan knowledge, skills, hobi/bakat dengan pengelolaan dari oleh dan untuk masyarakat sendiri. PKBM merupakan tempat untuk mempersiapkan kemandirian masyarakat untuk dapat cerdas dalam memecahkan berbagai persoalan yang ada dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Pesatnya perkembangan IPTEK dan permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di masyarakat serta kebutuhan akan pendidikannya.

UNESCO dalam Kamil (2011:85), memberikan definisi bahwa PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. PKBM adalah sebuah model pelebagaan yang diartikan, bahwa PKBM sebagai basis pendidikan Masyarakat, dikelola secara profesional oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga masyarakat dengan mudah dapat berhubungan dengan PKBM dan meminta informasi tentang berbagai program pendidikan masyarakat, persyaratannya, dan jadwal pelaksanaannya. Pelebagaan artinya menempatkan PKBM sebagai basis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat di tingkat operasional (desa/kelurahan).

Jadi, berdasarkan definisi- definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan melalui pelatihan-pelatihan keterampilan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2.1.4.2 Tujuan dan Fungsi PKBM

Menurut (Sihombing, 2011:117), salah satu karakteristik utama dan pertama dalam pengembangan dan penumbuhan semua kegiatan PKBM adalah

peningkatan partisipasi masyarakat. Sehingga PKBM merupakan salah satu wadah dalam memberikan kesempatan penuh kepada seluruh komponen masyarakat agar mampu:

1. Memberdayakan masyarakat agar mandiri dan berswadaya
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Mengembangkan dan pembangunan masyarakat.

Dari ketiga kriteria tersebut PKBM harus mampu dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga PKBM lebih bermakna, bermanfaat, selaras, dan sesuai dengan kebutuhan. Ada tiga tujuan penting dalam rangka pendirian dan pengembangan PKBM yaitu; 1) Memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri (berdaya). 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi. 3) Meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya sehingga mampu memecahkan permasalahan tersebut. Tujuan pelebagaan PKBM adalah untuk menggali, menumbuhkan, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat, untuk sebesar-besarnya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Menurut Sihombing (2011:118) Fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah:

1. Sebagai tempat masyarakat belajar (*learning society*), PKBM merupakan tempat masyarakat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan bermacam ragam keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhannya, sehingga masyarakat berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya.
2. Sebagai tempat tukar belajar (*learning exchange*), PKBM memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran berbagai informasi (pengalaman), ilmu

pengetahuan dan keterampilan antar warga belajar, sehingga antara warga belajar yang satu dengan yang lainnya bisa saling mengisi. Sehingga setiap warga belajar sangat dimungkinkan dapat berperan sebagai sumber belajar bagi warga belajar lainnya (masyarakat lainnya).

3. Sebagai pusat informasi atau taman bacaan masyarakat (perpustakaan) masyarakat, sebagai TBM. PKBM harus mampu berfungsi sebagai bank informasi, artinya PKBM dapat dijadikan tempat menyimpan berbagai informasi pengetahuan dan keterampilan secara aman dan kemudian disalurkan kepada masyarakat atau warga belajar yang membutuhkan.
4. Sebagai setra pertemuan berbagai lapisan masyarakat, fungsi PKBM dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pengelola dengan sumber belajar dan warga belajar, akan tetapi PKBM berfungsi sebagai tempat berkumpulnya seluruh komponen masyarakat (tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, aparat pemerintah daerah, pengusaha/swasta, dokter LSM, dll)
5. Sebagai pusat penelitian masyarakat (*community research centre*) terutama dalam pengembangan pendidikan nonformal, PKBM berfungsi sebagai tempat menggali, mengkaji, menelaah (menganalisis) berbagai persoalan atau permasalahan dalam bidang pendidikan non formal dan keterampilan baik yang berkaitan dengan program yang dikembangkan di PKBM maupun yang berkaitan dengan program-program lain yang selaras dengan azas dan tujuan PKBM.

Jadi dapat disimpulkan bahwa PKBM adalah wadah pendidikan non formal yang dibangun masyarakat untuk memberdayakan diri sendiri. Tujuannya

membuat warga mandiri, meningkatkan kualitas hidup, dan peka terhadap masalah lokal. Fungsinya sebagai tempat belajar, tukar pengalaman, perpustakaan informasi, pertemuan komunitas, serta pusat penelitian, sehingga relevan untuk tingkatan partisipasi Paket C di PKBM Wijayakusuma.

2.1.4.3 Program-Program PKBM

Acuan dalam mengembangkan dan menyusun program PKBM di antaranya adalah (Ditbindikmas, 2013:13):

1. Program yang dikembangkan harus meluas sehingga warga belajar memperoleh kesempatan yang sebebaskan-bebasnya dalam mengembangkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang berkaitan dengan etika, estetika, logika, dan kinestetika pada saat pembelajaran.
2. Program harus memiliki prinsip keseimbangan (*balanced*) dimana setiap kompetensi yang dikembangkan dalam program PKBM harus dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk sebuah proses pembelajaran yang efektif.
3. Program yang dikembangkan PKBM harus relevan karena setiap program berkaitan dengan penyiapan warga belajar untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan, pengalaman, dan latihan dalam berperan dan sikap secara bertanggungjawab dalam mewujudkan kedewasaan berfikir warga belajar.
4. Program yang dikembangkan PKBM harus mampu mengedepankan konsep perbedaan (*differentiated*), prinsip ini merupakan upaya pelayanan individual dimana warga belajar harus memahami: apa yang perlu dipelajari, bagaimana

berpikir, bagaimana belajar, dan berbuat untuk mengembangkan potensi dan kebutuhan dirinya masing-masing secara optional.

Untuk mendukung terlaksananya prinsip-prinsip tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi patokan pengembangan PKBM meliputi (Ditbindikmas, 2013:15):

1. Kualitas sumberdaya manusia yang mengusung program.
2. Kemampuan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu (masyarakat, pemerintah, dan sumber-sumber lainnya).
3. Kemampuan (kualitas, kompetensi) sumber belajar (tutor, fasilitator) terutama kesesuaian dengan program.
4. Warga belajar yang berminat dan butuh dengan program yang dikembangkan. Fasilitas pendukung program yang refresentatif sesuai dengan kebutuhan program.
5. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan program.
6. Alat kontrol (supervisi, monitoring, dan evaluasi) program.
7. Daya dukung lain seperti model yang akan dikembangkan, materi, modul atau sumber belajar lain yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan sasaran didik.
8. Anggaran untuk mendukung program.
9. Pemeliharaan program agar program tetap eksis.
10. Pengembangan program ke depan

Program-program yang dijalankan oleh pusat kegiatan belajar masyarakat saat ini antara lain, yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Kesetaraan

(Kejar paket), Taman Baca Masyarakat, Kelompok Bina Usaha (KBU), Kursus keterampilan praktis, seperti menjahit, komputer, tata boga, dan lain-lain, yang bertujuan meningkatkan skill dan kompetensi peserta sesuai kebutuhan pasar kerja dan kehidupan sehari-hari.

2.1.5 Kualitas Pembelajaran

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran

Menurut Mariani (2012:2) kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran, serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Sedangkan menurut Daryanto (2013:12) kualitas pembelajaran adalah suatu tingkatan pencapaian dari tujuan pembelajaran awal termasuk didalamnya adalah pembelajaran seni, dalam pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap peserta didik melalui proses pembelajaran dikelas

Kualitas pembelajaran memiliki indikator menurut Depdiknas dalam Prasetyo (2013: 13) antara lain:

a) Perilaku pembelajaran pendidik (guru)

Keterampilan dalam mengajar seorang guru menunjukkan karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan.

b) Perilaku atau aktivitas siswa

Di Sekolah banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas sekolah tidak hanya belajar, membaca buku, mencatat ataupun mendengarkan guru mengajar. Aktivitas siswa bisa berupa aktivitas diluar kelas, ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya.

c) Iklim pembelajaran

Iklim pembelajaran dapat berupa suasana kelas yang kondusif dan suasana sekolah yang nyaman.

d) Materi pembelajaran

Materi pembelajaran yang berkualitas terlihat dari kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus ditempuh.

e) Media pembelajaran

Media pembelajaran menciptakan suasana belajar menjadi aktif, memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dan siswa, siswa dan ahli bidang ilmu yang relevan.

f) Sistem pembelajaran

Sistem pembelajaran disekolah mampu meunjukkan kualitasnya jika sekolah menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan lulusannya.

Sedangkan menurut Mariani (dalam Haryati&Rochman,2012:2) Kualitas pembelajaran merupakan intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran, serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran dapat mengukur sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai akan menghasilkan hasil belajar yang optimal dari peserta didik, kualitas dapat dimaknai sebagai mutu atau keefektifan.

2.1.5.2 Indikator Kualitas Pembelajaran

Untuk mengetahui ketercapaian kualitas pembelajaran, maka perlu adanya indikator-indikator kualitas pembelajaran. Berikut ini akan dijabarkan beberapa indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 8-10).

1) Perilaku guru dalam pembelajaran

Dalam proses belajar mengajar, guru bertugas mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru juga bertanggung jawab melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa (Slameto, 2010:97). Perilaku guru dalam pembelajaran dapat dilihat dari kinerjanya. Berikut ini Depdiknas (2004:8) mengemukakan beberapa kemampuan yang perlu dimiliki guru untuk mendukung kinerjanya dalam pelaksanaan pembelajaran.

- a. Kemampuan dalam membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan guru
- b. Menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu memilih, menata, mengemas, dan merepresentasikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa

- c. Kemampuan dalam memahami karakteristik siswa yang meliputi kelebihan, kekurangan, kebutuhan siswa, latar belakang lingkungan keluarga, dan kemajemukan masyarakat tempat tinggal siswa agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa
- d. Menguasai pengelolaan pembelajaran berorientasi pada siswa yang tercermin dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan pembelajaran, dan memanfaatkan hasil evaluasi dalam upaya pencapaian kompetensi siswa yang dikehendaki
- e. Mampu mengembangkan kepribadian dan keprofesionalannya sebagai kemampuan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan mengembangkan kemampuannya secara mandiri.

2) Perilaku dan dampak belajar siswa

Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan siswa untuk belajar secara mandiri atau melakukan aktivitas sendiri. Kegiatan atau aktivitas belajar siswa menjadi dasar dalam pencapaian tujuan atau hasil belajar siswa (Hamalik, 2010:171-172). Untuk mencapai tujuan atau hasil belajar yang telah ditetapkan, maka perlu memperhatikan beberapa kompetensi yang berkaitan dengan perilaku dan dampak belajar siswa. Berikut ini Depdiknas (2004: 8-9) mengemukakan beberapa kompetensi yang berkaitan dengan perilaku dan dampak belajar siswa.

- a. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, termasuk di dalamnya persepsi dan sikap terhadap mata pelajaran, guru, media, dan fasilitas belajar serta iklim belajar
- b. Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya
- c. Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya
- d. Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara bermakna
- e. Mau dan mampu membangun kebiasaan berfikir, bersikap, dan bekerja produktif.

3) Iklim pembelajaran

Iklim belajar terdiri dari dua kata yaitu iklim dan belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia iklim berarti “keadaan”, dan belajar berarti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Menurut Auliansah, Nisaa, (2021:15) iklim belajar merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru dan siswa-siswa. Sedangkan menurut Ganda (2014:212) iklim belajar adalah suasana atau kondisi yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Iklim pembelajaran mencakup dua aspek, yaitu suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna bagi pembentukan

profesionalitas kependidikan serta perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru (Depdiknas, 2004: 9).

4) Materi pembelajaran yang berkualitas

Bahan atau materi (subject content) merupakan isi/konten dari kurikulum yang berupa pengalaman belajar dalam bentuk topik/subtopik dan rinciannya (Rusman, 2011:157). Bahan ajar dikemukakan oleh Pannen dalam (Prastowo, 2014:17) sebagai bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Depdiknas (2004:9) mengemukakan materi pembelajaran yang berkualitas terlihat dari: a) Kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa, b) Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan alokasi waktu yang tersedia, c) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, d) Memotivasi siswa untuk mempelajarinya, serta e) Mampu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan seni.

5) Kualitas media pembelajaran

Media pembelajaran menurut Sukiman (2012: 29) adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru kepada siswa sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam proses belajar sehingga berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif. Pemanfaatan media pembelajaran berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena

itu guru harus menggunakan media yang berkualitas. Kualitas media pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 9) dapat dilihat dari:

- a. Pengetahuan dan pengalaman belajar yang diberikan, yaitu diharapkan media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.
- b. Pengalaman belajar yang diciptakan melalui media adalah pengalaman belajar yang bermakna.
- c. Kemampuan dalam memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan.
- d. Kemampuan dalam menciptakan suasana belajar bagi siswa yang pasif menjadi aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada.

Djamarah (2010: 136) mengemukakan enam langkah yang perlu dilakukan guru pada saat mengajar menggunakan media atau alat peraga, yaitu: 1) merumuskan tujuan, 2) memilih media yang sesuai, 3) memotivasi siswa agar berpartisipasi aktif, 4) menjelaskan penyajian media atau alat peraga yang digunakan, 5) memberi kesempatan kepada siswa untuk praktik menggunakan media atau alat peraga, dan 6) mengevaluasi atau menilai sejauh mana pengaruh media terhadap keberhasilan siswa.

6) Sistem Pembelajaran

Sistem merupakan suatu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi secara fungsional dengan adanya input yang akan menghasilkan output

Sutarman (2012:13). Menurut Depdiknas (2004: 10) sistem pembelajaran yang berkualitas ditunjukkan sebagai berikut: (1) memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis oleh komponen sistem pendidikan dalam tubuh lembaga, (2) adanya semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi lembaga yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua siswa melalui berbagai aktivitas pengembangan, serta (3) adanya pengendalian dan penjaminan mutu.

Dari uraian mengenai kualitas pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang tampak dari indikator-indikatornya, yaitu perilaku guru, perilaku dan dampak belajar siswa, materi, media, iklim, dan sistem pembelajaran. Indikator-indikator kualitas pembelajaran saling berkaitan untuk menghasilkan output yang maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas indikator-indikator tersebut kecuali indikator sistem pembelajaran. Indikator sistem pembelajaran tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini karena membutuhkan waktu yang lama dalam penelitiannya.

2.1.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pembelajaran

Menurut Dimyati dan Mudjono (2009:132) untuk dapat mengelola dan merancang program pembelajaran dan proses pembelajaran seorang guru hendaknya mengenal faktor-faktor penentu kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah karakteristik tujuan. Karakteristik mata pelajaran atau bidang studi,

karakteristik siswa, karakteristik lingkungan atau setting pembelajaran, dan karakteristik guru.

Menurut Sanjaya (2006:52) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses pembelajaran yaitu:

1) Faktor Guru

Menurut Dunkin (1974) dalam Wina Sanjaya (2006:53) ada sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru yaitu *teacher formative experience*, *teacher training experience*

2) Faktor Siswa

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung proses pembelajaran.

4) Faktor Lingkungan

Faktor organisasi kelas yang didalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 158 ayat 1 (dalam Sukardi, 2011:12) tentang Sisdiknas yang menyatakan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Uraian tersebut menyebutkan bahwa evaluasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran.

Kualitas menunjukkan kepada suatu perubahan dari yang rendah menjadi tinggi atau sebaliknya. Kualitas pembelajaran dapat diketahui diantaranya melalui peningkatan aktifitas dan kreatifitas peserta didik, peningkatan disiplin belajar, dan peningkatan motivasi belajar (Mulyasa, 2004:105). Selain itu, tersedianya sarana prasarana dan strategi/metode yang tepat juga mendukung berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan. Keseluruhan kriteria kualitas tersebut tentu saja membutuhkan kompetensi guru, sebagai salah satu komponen aktif dalam melaksanakan pembelajaran.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas mengajar adalah faktor guru, faktor siswa, karakteristik lingkungan atau setting pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain peneliti sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA, JUDUL & TAHUN	HASIL PENELITIAN	IMPLIKASI
1.	Abdul Rahman (2024), "Peran PKBM dalam Meningkatkan Pendidikan di Daerah Pinggiran Kota (Studi Kasus pada PKBM Hidayah)"	1) Perencanaan, terlihat dari program besar yang diambil yakni mengurangi buta huruf dan memberikan keterampilan kepada peserta didik, 2) Pengorganisasian, terlihat dari pembagian tugas mulai dari kepala yayasan yang menunjuk penanggung jawab di setiap program, dilanjutkan dengan menunjuk guru bantu	PKBM berfungsi sebagai solusi bagi masyarakat di pinggiran kota untuk melanjutkan pendidikan tanpa terikat aturan kaku sekolah formal

		di masing-masing program dengan mensinkronkan setiap kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3) Pelaksanaan, terbukti dengan banyaknya lulusan Paket C yang mendapatkan pekerjaan di pemerintahan kecamatan Bojongsoang, 4. Evaluasi telah berjalan, terlihat dengan meningkatnya indeks lulusan masyarakat kecamatan Bojongsoang	
2.	Ni Made (2024), “Pemanfaatan Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kreativitas Pembelajaran Di PKBM Niti Mandala Club”	Dengan memanfaatkan digitalisasi dapat mengasah kreativitas para siswa dalam berkomunikasi. Melalui aplikasi digital juga sebagai media pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan PKBM Niti Mandala Club pada peran penting sebagai penyedia akses pendidikan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Para siswa juga diajarkan untuk menggunakan media digital berupa video youtube untuk belajar cara membaca pesan puisi yang tepat dengan artikulasi yang tepat agar pesan dapat tersampaikan dengan baik.	Guru menghadapi tantangan untuk terus meningkatkan keterampilan dalam mengoperasikan platform digital dan merancang pembelajaran berbasis teknologi yang efektif.
3.	Zaifulloh (2023), “Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Era Society 5.0”	Pendidikan non formal mempunyai fungsi membelajarkan individu atau kelompok agar mampu memberdayakan dan mengembangkan dirinya sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan atau perkembangan zaman.	Meningkatnya relevansi pendidikan nonformal melalui adaptasi teknologi untuk pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan masyarakat
4.	Siti Nur Azizah (2021),	Beberapa potensi PKBM	PKBM

	“Strategi Pengembangan Kegiatan Pembelajaran di PKBM”	dapat dikembangkan, seiring dengan posisinya sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang ditandai dengan (1) dukungan masyarakat dalam berbagai bentuk pembelajaran; (2) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; (3) anggota masyarakat ikut membangun hubungan yang setara; (4) kepemilikan dimana anggota masyarakat turut serta mengendalikan semua keputusan yang berkaitan dengan program pendidikan di luar sekolah	mengembangkan program serta melibatkan dan memanfaatkan potensi masyarakat
5.	Distiani (2018) , “Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C (Setara SMA) di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: PKBM Indah Kusuma Bangsa Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)”	Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan oleh PKBM Indah kusuma Bangsa Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung telah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Komunikasi yang terjalin cukup baik, sumber-sumber yang ada sudah cukup memadai, kecenderungan-kecenderungan yang ada kearah positif yaitu dengan adanya komitmen dan dukungan yang ada dari pemerintah	- Memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal di SMA untuk tetap melanjutkan pendidikan. - Ijazah setara SMA yang diakui pemerintah membuka peluang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu tersebut penulis menyimpulkan bahwa beberapa penelitian belum menjelaskan secara detail mengenai inovasi sistem dalam mengembangkan pendidikan kesetaraan paket C di Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM). Oleh karena itu kebaruan/novelty pada penelitian ini akan membahas mengenai pengimplementasian strategi dalam pengembangan sistem pendidikan kesetaraan pada paket C/setara SMA di PKBM Wijayakusuma Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

2.3 Pendekatan Masalah

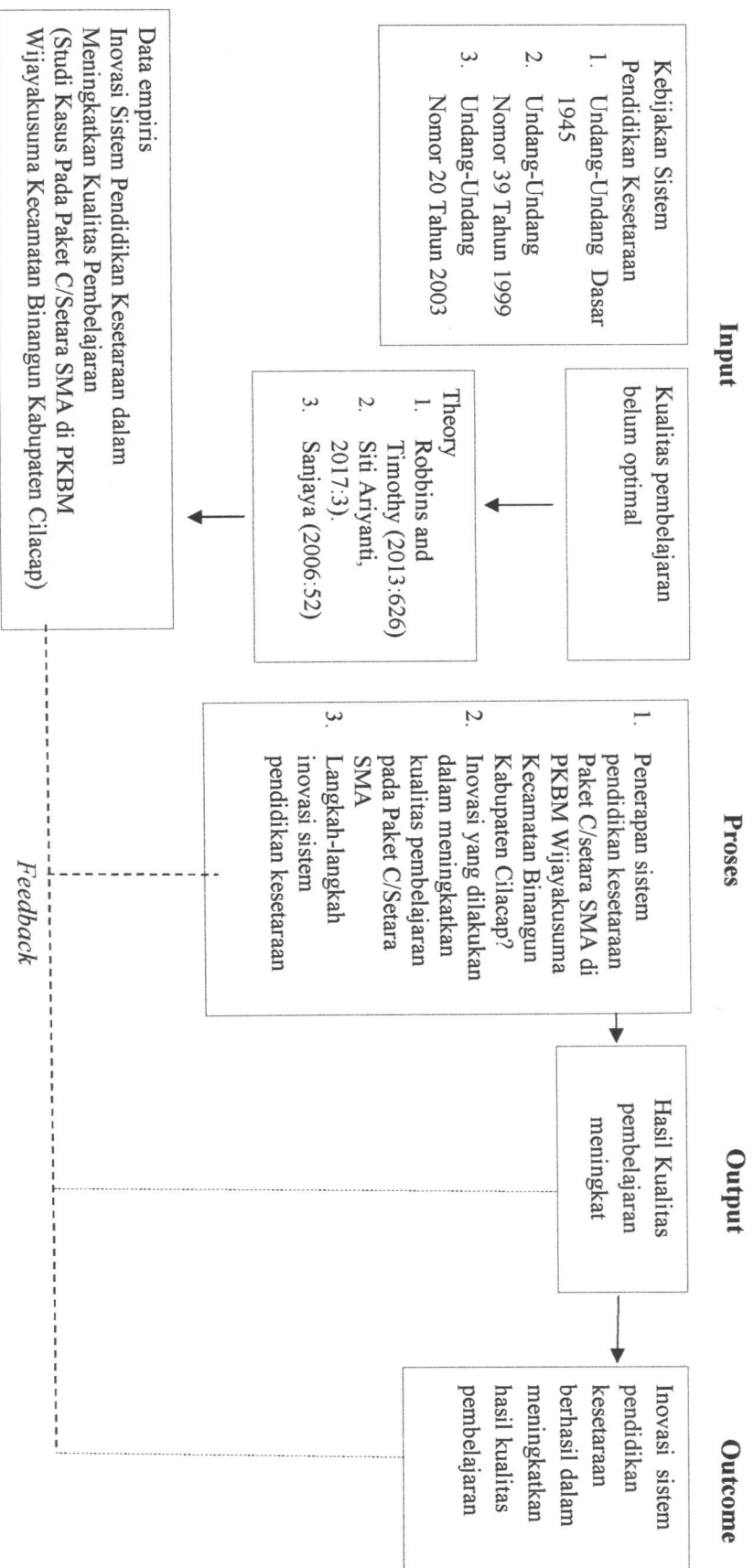
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu wadah dari program-program yang diluncurkan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen PLS.P (2005), Keberadaan PKBM haruslah sepenuhnya demi kemajuan kehidupan masyarakat dimana PKBM tersebut berada dan pemilihan program-program yang diselenggarakan di PKBM harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini juga tentunya juga tidak berarti menutup kemungkinan anggota masyarakat diluar masyarakat tersebut untuk turut serta dalam pembelajaran dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM.

Menurut Sihombing (2000: 157) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam rangka usaha meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat yang bertitik tolak dari kebermanaknaan dan kebermanfaatan program bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di lingkungannya.

Pendidikan kesetaraan memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan belajar bagi warga yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal, khususnya di daerah-daerah dengan hambatan geografis, sosial, maupun

ekonomi. Di Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Binangun melalui PKBM Wijayakusuma, program Paket C menjadi alternatif strategis bagi warga belajar untuk memperoleh kualifikasi setara SMA. Namun, implementasi strategi pengembangan sistem pendidikan kesetaraan dalam meningkatkan hasil kualitas pembelajaran di PKBM ini membutuhkan kajian mendalam mengenai sejauh mana strategi tersebut diterapkan secara efektif, kendala apa saja yang dihadapi, serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Dengan inovasi sistem pendidikan kesetaraan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidikan nonformal serta pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Cilacap. Merujuk pada David (2015:39) yang menjadi kerangka manajemen esensial dalam mengelola program pendidikan kesetaraan, yaitu melalui sistem formulasi, implementasi dan evaluasi. Dengan mengimplementasikan strategi pengembangan sistem pendidikan kesetaraan tersebut diharapkan menjadi pendekatan yang komprehensif dan efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mengoptimalkan sumber daya, serta menjamin keberlanjutan program-program pendidikan nonformal dan terpenting meningkatkan kualitas pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut. Berdasarkan pendekatan masalah yang telah dikemukakan maka gambar pendekatan masalah dalam penelitian disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Pendekatan Masalah